

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI
ANGGARAN DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
DANA DESA PADA DESA CENKERING PEKAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN
BATU BARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Publik*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

NAMA :NETTI NABABAN
NPM 1705170202
PROGRAM STUDI :AKUNTANSI
KONSENTRASI :AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NETTI NABABAN
NPM : 1705170202
Program Studi : AKUNTANSI
Kosentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA CENKERING PEKAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Penguji II

(M. SHAREZA HAMIZ, SE., M.Acc)

Pembimbing

(MASTA SEMBIRING, SE., M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NETTI NABABAN

NPM : 1705170202

Program Studi : AKUNTANSI

Konsetrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI
ANGGARAN DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
DANA DESA PADA CENKERING PEKAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN
BATUBARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(MASTA SEMBIRING, SE., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. HANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten MuKhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETTI NABABAN**
NPM : 1705170202
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DANA
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA
CENKERING PEKAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN
BATU BARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



NETTI NABABAN

ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA CENKERING PEKAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

**Netti Nababan
1705170202**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa dalam lingkup kantor Desa Cengkering Pekan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 responden. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 15. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas. Partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas.

Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Akuntabilitas

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warohmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, ,sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat Alm Ayahanda **Barimun Nababan** dan Ibunda **Lamria Sihombing S.Pd** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal ini, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekal III Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Dr Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap SE., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Ibu **Masta Sembiring, SE, M.Ak** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini dengan baik
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, April 2021

NETTI NABABAN

1705170202

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.PENDAHULUAN 90.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II.KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Akuntabilitas.....	12
a. Pengertian akuntabilitas.....	12
b. Pengukuran akuntabilitas	14
c. Tujuan akuntabilitas	17
d. Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas	19
2. Anggaran	21
a. Pengertian Anggaran	21
b. Proses Penyusunan Anggaran	22
c. Partisipasi Anggaran	22
d. Manfaat Partisipasi Anggaran	24
e. Indikator Partisipasi Anggaran	27
3. Evaluasi Anggaran	27
a. Pengertian Evaluasi Anggaran.....	27
b. Tujuan Evaluasi Anggaran	29
c. Fungsi Evaluasi Anggaran	30
4. Review Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Konseptual	34
C. Hipotesis.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu	38
C. Populasi dan Sampel	39
D. Defenisi operasional.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Analisi Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel1.1. Data Anggaran Belanja	5
Tabel2.1. Review penelitian terdahulu.....	32
Tabel3.1. Waktu penelitian	38
Tabel3.2. Matriks penelitian	40
Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Usian.....	49
Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin	49
Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 4.4. Tabulasi Jawaban Responden Partisipasi Anggaran.....	50
Tabel 4.5. Tabulasi Jawaban Responden partisipasi Evaluasi	51
Tabel 4.6. Tabulasi Jawaban Responden Akuntabilitas.....	52
Tabel 4.7. Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.8. Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.9. Regresi Berganda	58
Tabel 4.10 Uji t	59
Tabel 4.11. Uji F	60
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar2.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar4.1 Grafik P-Plot	55
Gambar4.2 Scaterplot	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang akuntabilitas pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian akuntabilitas yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dikeluarkannya Undang – undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang – undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Undang – undang No. 32 tahun 2004 dan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan

Penerapan anggaran berbasis akuntabilitas diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis akuntabilitas dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis akuntabilitas menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Anggaran Berbasis Akuntabilitas (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Anggaran dengan pendekatan akuntabilitas menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas akuntabilitas output. Pendekatan anggaran akuntabilitas disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2018).

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada akuntabilitas akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran akuntabilitas secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan

secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Penyusunan anggaran berbasis akuntabilitas bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis akuntabilitas tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis akuntabilitas memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan akuntabilitas organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*.

Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah *mind set* tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. *Mind set* DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi *output base*, tidak lagi *input base*.

Penyusunan Rancangan ADD di Kantor Desa Cengkaring Pekan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala Desa dan perangkat desa, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun

bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ADD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ADD dan penyampaianya, setelah itu dilakukannya evaluasi ADD, ketika dalam proses evaluasi ini ADD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang ADD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ADD.

(Tangkilisan, 2010) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Menurut (Ulum, 2004) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi seperti dalam pembentukan sistem pengendalian internal, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, merancang tujuan anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset nampak sangat rumit dan *complicated*, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan, padahal sebenarnya penyelesaiannya bisa "sangat sederhana". Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah daerah tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja yang diakibatkan oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan dapat dikatakan gagal.

Pada penelitian ini peneliti hanya faktor sistem yang mempengaruhi akuntabilitas seperti partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan evaluasi anggaran. Hal tersebut dilakukan karena Dalam penilaian akuntabilitas, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu saja, melainkan meliputi berbagai aspek yang bersifat menyeluruh.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana akuntabilitas pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama akuntabilitas instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Untuk Pemerintahan Desa Cengkering Pekan, berdasarkan data Anggaran Dana Desa Tahun 2017-2019, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan akuntabilitas dan perbaikan akuntabilitas yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

**Data Anggaran Dana Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batubara**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2017	4.625.169.942.881	3.723.643.299.085	81
2018	5.467.952.757.114	4.374.968.274.136	80
2019	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655	79

Sumber : LAKIP Desa Cengkering Pekan Tahun 2014

. Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa realisasi belanja Dana Desa pada tahun 2017-2019 tidak mencapai 100% sementara menurut (Halim, 2008) Analisis terhadap akuntabilitas belanja daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian akuntabilitas

anggaran belanja merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan ADD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Berdasarkan tabel I-1 terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2017-2019 yang artinya penggunaan anggaran belanja yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan anggaran dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional. Sesuai teori yang dikemukakan oleh (Mulyadi, 2001) bahwa Analisis terhadap belanja daerah secara umum terlihat dari realisasi biaya dan anggarannya. Apabila realisasi anggaran belanja daerah yang tidak melampaui anggaran (target) maka akuntabilitas dapat dinilai dengan baik”.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas akuntabilitas ini merupakan bentuk pelaporan akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program / kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Analisis terhadap akuntabilitas manjerial secara umum terlihat dari penyerapan anggarannya. Apabila penyerapan anggaran tidak memenuhi target maka akuntabilitas manajerial dapat dinilai dengan tidak baik. Ketidakefektifan dalam melakukan partisipasi dalam penyusunan anggaran serta pengawasan ataupun menjelaskan sasaran anggaran tersebut hal ini disebabkan oleh pimpinan memiliki kesibukan dalam melakukan pekerjaan sehingga susah untuk mengkoordinir dan mengatur beberapa staf yang ada di instansi sehingga akuntabilitas dari beberapa bidang tersebut tidak terlaksana dengan baik. Sementara menurut (Mashun, 2009) definisi akuntabilitas manajerial adalah “akuntabilitas manajer dalam kegiatan-kegiatan manajerial yang meliputi : perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, karakteristik, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan atau representasi”.

Menurut (Mahmudi, 2010), Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sub sistem dan menghubungkan mereka dengan lingkungannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen memegang peranan penting dalam mekanisme suatu

organisasi. Dengan kata lain bahwa maju mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan di dalam organisasi tersebut.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis akuntabilitas terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. (Ray, 2008), telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap akuntabilitas yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap akuntabilitas SKPD,

(Halim, A., & Syukri, 2006), menguji tentang Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di pemerintah aceh, hasil ini menunjukkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh.

Pratiwy (2013), menguji Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Padang), hasil ini menunjukkan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran,

Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas maka hal-hal yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi belanja dana desa pada tahun 2017-2019 tidak mencapai 100%
2. Terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2017-2019
3. Kinerja manajerial belum berjalan dengan baik karena nilai realisasi tidak mencapai target

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara?
2. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara?
3. Apakah partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

- a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

- b. Bagi institusi

Diharapkan dapat memberi masukan bagi para penentu kebijakan di instansi Kantor Desa Cengkering Pekan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan adanya keterlibatan dari manajemen bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pelimpahan wewenang yang diberikan pada manajemen bawahan mempunyai hubungan erat dengan partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai

hubungan positif terhadap akuntabilitas manajerial hanya pada pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi.

c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian yang akan datang mengenai partisipasi anggaran, karakteristik tujuan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas manajerial.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Mashun, 2009) Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertngghungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Menurut (Mashun, 2009) Akuntabilitas merupakan instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi publik. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik.

Menurut (Bastian, 2006) akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan

dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Menurut (Subroto, 2014) mendefinisikan akuntabilitas adalah : Akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat dan mengukur perinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan hak dihadapan hukum telah diimplementasikan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

b. Pengukuran Akuntabilitas

(Tangkilisan, 2010) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) *Exemplary leadership*, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan;
- 2) *Public Debate*, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal;

- 3) *Coordination*, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas
- 4) *Autonomy*, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi;
- 5) *Explicitness and clarity*, artinya standar karakteristik akuntabilitas harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan
- 6) *Legitimacy and acceptance*, tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak;
- 7) *Negotiation*, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah;
- 8) *Educational campaign and publicity*, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut;
- 9) *Feed back and evaluation*, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan karakteristik perbaikannya.

10) *Adaption and recycling*, yaitu perubahan yang terjadi dimasyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan Menurut (Suwanto, Priansyah, & Juni, 2011) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :

1. Kemampuan perencanaan
2. Kemampuan pengorganisasian
3. Kemampuan kepemimpinan
4. kemampuan pengendalian”.

Dari keempat faktor manajemen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kemampuan Perencanaan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa yang harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat.

2. Kemampuan pengorganisasian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku pegawai.

3. Kemampuan kepemimpinan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses pemantauan akuntabilitas aktual, membandingkan actual dengan standar, dan membuat koreksinya jika perlu.

4. Kemampuan pengendalian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

c. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap. Kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

(Rahadi & Muslih, 2019) menyatakan : Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintahan sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai akuntabilitas pemerintahan dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan menurut (Renyowijoyo, 2008) bahwa : Guna

mengukur akuntabilitas mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut (Renyowijoyo, 2008) ada delapan hal yang harus dikerjakan pemerintahan untuk peningkatan akuntabilitas:

1. Pemerintahan harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban
2. Pemerintahan perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3. Pemerintahan menyusun rencana pengembangan pemerintahan dan menyampaikan kepada publik/stakeholders diawal setiap tahun anggaran
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran akuntabilitas pemerintahan dan disampaikan kepada stakeholders
5. Melakukan pengukuran pencapaian akuntabilitas pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders dia akhir tahun.
6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
7. Menyediakan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan
8. Memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail (Tangkilisan, 2010) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian akuntabilitas organisasi sebagai berikut :

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi akuntabilitas organisasi tersebut
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi ;
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan seperti dalam proses penyusunan anggaran dan penggunaan dana alokasi anggaran.
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor eksternal, yang terdiri dari
 - 1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
 - 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan akuntabilitas organisasi.
2. Faktor internal, yang terdiri dari :
 - 1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi
 - 2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
 - 3) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan.
 - 4) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Adisaputro dan Asri (2003;6) mendefinisikan anggaran, “Sebagai pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan”.

Menurut Nasehatun (2004;195), “Anggaran merupakan suatu rencana yang menyeluruh dari segala tingkat kegiatan dalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka (uang) untuk suatu periode tertentu”.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1) Rencana

Anggaran yang disusun terlebih dahulu berisi tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Ini berarti bahwa anggaran itu sebenarnya berisi rencana aktivitas perusahaan.

2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan

Anggaran mencakup semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan.

3) Dinyatakan dalam unit moneter

Yaitu unit kuantitatif yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia adalah unit rupiah.

4) Jangka waktu tertentu yang akan datang

Ini menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang.

Maksudnya, apa yang dimuat di dalam anggaran adalah taksiran-taksiran (*forecast*) tentang apa yang akan terjadi serta apa yang dilakukan di waktu yang akan datang.

Ahyari (2005;8) menyatakan bahwa, “Anggaran perusahaan merupakan perencanaan secara formal dari seluruh kegiatan perusahaan di dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam unit kuantitatif (moneter)”.

b. Proses Penyusunan Anggaran

Menurut Mulyadi dalam Rahmanto (2001) proses penyusunan anggaran memerlukan berbagai tahap berikut ini:

1. Penetapan susunan anggaran oleh manajer atas,
2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah
3. *Review* oleh manajer terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah,
4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah

c. Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran pada pusat pertanggungjawaban. Organisasi sering mengikutsertakan manajer tingkat menengah dan bawah dalam proses

penyusunan anggaran. Keikutsertaan para manajer ini sangat penting dalam upaya memotivasi bawahan untuk turut serta mencapai tujuan. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi (Kurnia, 2004).

Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan akuntabilitas para manajer akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka manajer akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan para stakeholder juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 2003). Partisipasi penganggaran adalah tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan individu dalam proses perancangan anggaran. Tingkat pengaruh tersebut menjadi faktor utama dalam penelitian Milani tersebut untuk membedakan antara anggaran partisipasi dengan anggaran non partisipasi. Sedangkan Ghazali, *et.al.* (2001) membedakan partisipasi menjadi dua yaitu perasaan partisipasi dan partisipasi sesungguhnya. Perasaan partisipasi berarti seberapa luas individu merasa bahwa dia telah mempengaruhi keputusan sedangkan partisipasi sesungguhnya meliputi partisipasi legislatif, yaitu penciptaan sistem format untuk tujuan pembuatan keputusan khusus dan partisipasi informasi yaitu partisipasi yang terjadi antara manajer dan bawahannya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, di mana para individu terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang secara langsung

berpengaruh terhadap individu tersebut. Jadi dengan semakin tinggi tingkat keterlibatan manager dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan akuntabilitas (Indriantoro, 2000).

Dalam konteks yang lebih spesifik, partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan suatu proses dimana para individu yang akuntabilitasnya dikarakteristik dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran (Brownel dalam Supomo dan Indriantoro, 2000).

d. Manfaat Partisipasi Anggaran

Menurut Darlis (2002:27), salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipan dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi juga meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan.\

Menurut Dwipayana (2004: 78), tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang tersebut kemudian akan dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka. Proses ini disebut dengan internalisasi tujuan. Kurangnya internalisasi tujuan dapat menimbulkan konflik antara tujuan pribadi individual dan tujuan yang terkait dengan pegawai. Karena tujuan dan kebutuhan pribadi biasanya mendominasi tujuan organisasi, dan ketika terdapat tingkat kesatuan kelompok yang tinggi, maka persyaratan untuk efisiensi yang maksimal dalam pencapaian tujuan akan tercapai.

Menurut Abdul (2004:29), partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antara sub-unit organisasi, serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu.

Adanya proses negosiasi dan banyaknya diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar departemen. Dengan demikian, banyak masalah potensial yang berkaitan dengan anggaran dapat dihindari.

Selain itu, Darlis (2002:35) juga mengungkapkan bahwa partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama di antara para manajer. Betapapun demikian, bentuk keterlibatan bawahan/pelaksana anggaran di sini dapat bervariasi, tidak sama satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tidak ada pandangan yang seragam mengenai siapa saja yang harus turut berpartisipasi, seberapa dalam mereka terlibat dalam pengambilan keputusan (Siegel dan Marconi, 2003). Organisasi harus memutuskan sendiri batasan-batasan mengenai partisipasi yang akan mereka terapkan.

Menurut Siegel dan Marconi (2003:139), penerapan partisipasi dan penyusunan anggaran memberikan banyak manfaat antara lain:

1. Partisipan (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi *ego-involved* tidak hanya *task-involved* dalam kerja mereka.
2. Partisipan (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi *ego-involved* tidak hanya *task-involved* dalam kerja mereka.
3. Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran
4. Partisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya di antara bagian-bagian organisasi.

Meskipun partisipasi mempunyai banyak manfaat, bukan berarti partisipasi tidak memiliki keterbatasan dan masalah yang berkaitan dengan partisipasi. Sebagaimana ungkapan Siegel dan Marconi (2000:138), jika partisipasi tidak diterapkan secara benar, partisipasi dapat merusak motivasi dan menurunkan kemampuan untuk mencapai sasaran organisasi.

Menurut Darlis (2002:38), alasan lain mengapa partisipasi mungkin tidak berhasil adalah tidak ada usaha serius yang dibuat untuk menjamin partisipasi dan kerjasama dari para manajer tingkat bawah dan pegawai. Agar partisipasi menjadi efektif, partisipasi harus memiliki input riil terhadap keputusan dan pandangan mereka harus memiliki bobot tertentu dalam hasil akhir. Jika, saran-saran anggaran dari orang-orang ditolak oleh tingkat yang lebih tinggi tanpa penjelasan sama sekali, atau dengan pernyataan yang fasih bahwa saran tersebut tidak sesuai dengan tujuan manajemen puncak, maka partisipasi akan dipandang sebagai suatu kepura-puraan. Orang akan menjadi kecewa. Jika hal ini terjadi, sikap negatif atau bermusuhan terhadap manajemen akan berkembang, dan hal tersebut mungkin memberikan sinyal terhadap penurunan yang akan terjadi dalam efisiensi dan output.

Partisipasi dapat diterapkan secara efektif, jika manajemen puncak serta para manajer tingkat bawah bekerjasama dalam memahami dan menerapkan partisipasi dalam organisasi mereka, jika hal tersebut telah dilakukan partisipasi akan berhasil diterapkan dalam kondisi apapun, dan sebaliknya apabila manajemen puncak serta manajer tingkat bawah tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan partisipasi bahkan dalam organisasi yang paling

demokratis dan desentralisasi sekalipun, partisipasi tidak akan sukses untuk diterapkan.

e. Indikator Partisipasi Anggaran

Sesuai dengan teori yang didapat mengenai partisipasi anggaran, maka dapat ditentukan indikator partisipasi anggaran (Brownell dalam Falikhatun ; 2007), yaitu:

1. Keterlibatan

Keuangan organisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja juga merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan organisasi.

2. Pengaruh

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut

3. Komitmen

Karena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan akuntabilitas dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap budget

3. Evaluasi Anggaran

a. Pengertian Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis,

2009). Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan akuntabilitas manajer. *Punitive approach* dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan sikap yang negatif, sedangkan *supportive approach* dapat mengakibatkan sikap dan perilaku yang positif (Kurnia, 2004).

Arifin (2007:27) evaluasi yang bersifat *punitive* dapat menyebabkan rendahnya motivasi, sebaliknya evaluasi yang bersifat *supportive* dapat menghasilkan sikap dan tingkah laku positif.

Munawar (2006) menjelaskan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.

Menurut Ginting (2009 : 31), evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi akuntabilitas mereka

Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat akuntabilitas mereka menjadi rendah.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan evaluasi anggaran adalah evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian akuntabilitas. Dimana

apabila evaluasi yang dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen.

b. Tujuan Evaluasi Anggaran

Evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu 1) meyakinkan bahwa akuntabilitas yang sesungguhnya sesuai dengan akuntabilitas yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara akuntabilitas individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi akuntabilitas dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen (Kurnia, 2004).

Menurut Wahab (2002: 51) tujuan dari evaluasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai akuntabilitas kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Informasi tentang tidak memadai akuntabilitas kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

c. Fungsi Evaluasi Anggaran

Menurut Supriyono (2000:41) evaluasi anggaran mempunyai beberapa macam fungsi antara lain untuk :

1. Fungsi Koordinasi

Evaluasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu didalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses untuk menyelaraskan hubungan antara pegawai dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.

2. Fungsi Komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam

proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggungjawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3. Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

4. Fungsi Pengendalian

Evaluasi anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi "tanda bahaya" bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Seringkali istilah perencanaan dan pengendalian disatukan dan seringkali kedua istilah tersebut digunakan untuk maksud yang sama, sistem anggaran yang baik harus dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian, perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Sebaliknya, tanpa perencanaan tidak dapat dilakukan pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai.

5. Fungsi Pendidikan

Evaluasi anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar dimasa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

4. Review Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

c	Nama	Judul	Variabel	Kesimpulan
1	Fladimir Edwin Mbon (2014)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Daerah Yogyakarta	Partisipasi anggaran (X1) Karakteristik anggaran (X2) Akuntabilitas (Y)	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas, Karakteristik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas
2	Meria Solina (2015)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Pada Skpd Kota Tanjungpinang	Partisipasi Anggaran (X1) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Struktur Desentralisasi (X3) Akuntabilitas (Y)	partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, Struktur

				desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
3	Mayuraa (2014)	Pengaruh Kejelasan Dan Tujuan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Gorontalo	Kejelasan Anggaran Tujuan Anggaran Akuntabilitas	Hasil penelitian bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan ADD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan ADD, besarnya anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai.
4	Muhammad Yusuf (2015)	Prosedur Penyusunan Anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara	Prosedur Penyusunan Anggaran	Anggaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara disusun berdasarkan kebutuhan yang ada, yaitu dengan cara menyesuaikan kebutuhan seperti kebutuhan dana yang akan dipergunakan dalam Belanja Honorarium, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

B. Kerangka Konseptual

Akuntabilitas manajerial adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan penampilan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Akuntabilitas dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Akuntabilitas organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi akuntabilitas sejumlah individu dalam organisasi.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi (determinan) akuntabilitas individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori akuntabilitas. Secara umum faktor fisik dan non fisik sangat mempengaruhi. Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi dalam bekerja. Selain itu, kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik. Pada kesempatan ini pembahasan di fokuskan pada lingkungan non-fisik, yaitu kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat melekat dengan sistem manajerial perusahaan.

Salah satu alat pengendalian yang mempunyai ukuran-ukuran akuntansi adalah anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi. Anggaran sering digunakan untuk menilai akuntabilitas para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah semua hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan.

Anggaran merupakan salah satu komponen penting untuk menterjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dan juga berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi dan karakteristik prestasi.

Partisipasi penyusunan anggaran meningkatkan identifikasi para pegawai tidak hanya dengan sasaran anggaran tapi juga dengan tujuan organisasi karena komitmen organisasi mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi, maka partisipasi anggaran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya aspek evaluasi anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

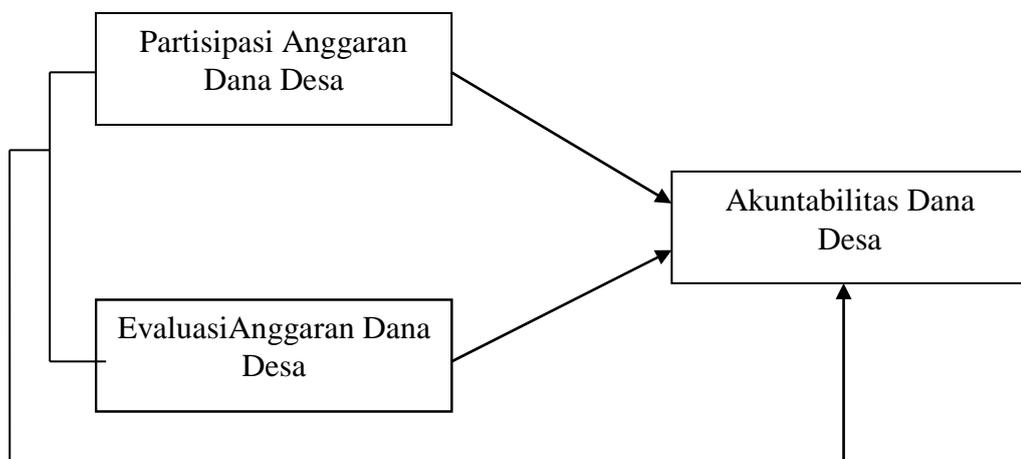
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

Kejelasan sasaran anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam karakteristik akuntabilitas manajer Bagian Keuangan memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam karakteristik akuntabilitas dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan akuntabilitas anggaran). Kecenderungannya, secara jelas hubungan antara variabel lemah.

Pentingnya aspek kejelasan sasaran anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil karakteristik dan tindak lanjut

dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil karakteristik juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan.

Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, sesuai dengan tujuan dan masalah yang dikemukakan, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
2. Evaluasi anggaran dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

3. Partisipasi anggaran dana desa dan evaluasi anggaran dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Zuliandi dan Irfan (2013 : 14) bahwa pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau mengetahui bahwa adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variable bebas dan variabel terikat)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara yang beralamat di Jalan S.M. Raja Gg. Pendidikan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 s/d Juli 2021

TABEL III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2020-2021																							
	Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■																							
2. Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■																
3. Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■								
4. Seminar Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■								
5. Pengumpulan Data																	■	■	■	■				
6. Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau																								■

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa dalam lingkup kantor Desa Cengkering Pekan yang terlibat dalam penyusunan anggaran dengan jumlah perangkat desa sebanyak 32 yang terdiri atas

1. 1 Kepala Desa,
2. 1 Sekretaris,
3. 4 Bidang Pengelola Keuangan,
4. 4 Bidang Penetapan
5. 4 Bidang Pengelola aset
6. 4 Bidang Unit Pelaksana
7. 4. Bidang Penertiban
8. 10 Kelompok Masyarakat

Penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (probability) dimana merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 responden, metode pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah populasi tidak mencapai seratus populasi.

D. Defenisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matriks Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Partisipasi Anggaran (X1) (Falikhatun ; 2007)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaruh jabatan Dengan jabatan yang lebih tinggi maka semakin baik untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran b. Penetapan anggaran Dalam partisipasi penyusunan anggaran maka penetapan anggaran yang sudah ditetapkan harus mencapai target yang sudah ditetapkan c. Opini dan pendapat Dalam partisipasi penyusunan anggaran dari beberapa tingkatan manajemen diperlukannya opini atau pendapat untuk menjalankan dari anggaran yang akan direncanakan. 	Likert
Evaluasi Anggaran (X2) Wahab (2002: 51)	<ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi Dalam mengevaluasi anggaran harus tercapai target dari anggaran tersebut untuk mewujudkan efisiensi anggaran tersebut b. Penyimpangan anggaran Apabila terjadi penyimpangan anggaran yang tidak terealisasi maka diperlukannya evaluasi terhadap kondisi yang terjadi c. Tanggungjawab Tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan di evaluasi akuntabilitas dari anggaran yang sudah disusun dan dapat dipertanggungjawabkan 	Likert

	<p>d. Evaluasi akuntabilitas Dengan adanya evaluasi akuntabilitas maka realisasi yang telah dijalankan sesuai dengan anggaran</p> <p>e. Pencapaian sasaran anggaran Evaluasi dari anggaran yang baik akan terwujudnya dari sasaran anggaran yang disusun.</p>	
Akuntabilitas (Y) (Kumurotomo 2005)	<p>a. Kejujuran Yaitu berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku dan dalam penggunaan dana harus dilakukan secara benar.</p> <p>b. Proses Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, manajemen dan proses administrasi.</p> <p>c. Program Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal</p> <p>d. Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mempertimbangkan masa depan.</p>	Likert

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket atau pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari awal

bulan Februari 2017 sampai dengan akhir bulan April 2017. Pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

Setelah dilakukannya pengumpulan kuesioner maka dari hasil kuesioner maka diuji terlebih dahulu keabsahan kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* $> 0,05$ (Hair, 1998).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*. Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Nunnally, 1978).

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 15 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi silang dan analisis rasio yang menggunakan Minimum, Maksimum, Mean, Median, Mode, Standard Deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Hipotesis memerlukan asumsi klasik, karena model analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari:

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati personal branding normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak yaitu melalui pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila personal branding data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data sepanjang garis diagonal.

2) Uji Multikolonieritas

Digunakan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat/ tinggi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas maka terjadi multikolonieritas, demikian juga

sebaliknya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara diantara variabel independen. Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen dan nilai tolerance. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah $\text{tolerance} < 0,10$ sama dengan $\text{VIF} > 10$.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antara lain:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik- titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

3. Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16.0 for Windows*. Untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, dilakukan memprediksi variabel *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- α : Konstanta
- β : Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel
- Y : Akuntabilitas
- X1 : Partisipasi Anggaran
- X2 : Evaluasi anggaran

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik sebagai berikut :

- a. Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
- b. Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki angka VIF di sekitar 1, dan nilai tolerance mendekati 1 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel lain.
- c. Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Pengujian Secara Parsial

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas karakteristik manajemen dan partisipasi anggaran. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas manajerial.

H_a : ada pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas manajerial.

2. Membandingkan hasil t_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $t_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a Ditolak

Jika $t_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak. Dan H_a Diterima

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t_{hitung}

r_{xy} = korelasi xy yang ditemukan

n = jumlah sampel

b. Pengujian Secara Simultan

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas manajerial.

H_a : ada pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas manajerial.

2. Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_a diterima

$$Fh = \frac{R^2 \int k}{(1-r^2) \int (n-k-1)}$$

Dimana :

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

N = sampel

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D =Determinasi
R² =Nilai korelasi berganda
100% =Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Temuan

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 32 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Desa Cengkering Pekan Pada penelitian ini pula penulis menggunakan questioner sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat menghasilkan penelitian yang berguna

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada dua (2) variabel X, yaitu partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan 1 (satu) variabel Y yaitu akuntabilitas (Y).

2. Karakteristik Responden

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 32 responden, tentu memiliki perbedaan karakteristik baik itu secara usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Banyaknya perangkat desa Desa Cengkering Pekan, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk masing-masing identitas pribadi para responden.

Data kuesioner yang disebarkan diperoleh beberapa karakteristik responden, yakni jenis usia, pendidikan dan pekerjaan. Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent
25 – 30	7	22.0	22.0
> 30	25	78.0	78.0
Total	32	100	100

Sumber data : SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Cengkering Pekan terdiri dari berbagai karakteristik usia yang berbeda-beda dari yang muda sampai yang tua. Hal ini berarti perangkat desa di Desa Cengkering Pekan didominasi satu karakteristik usia dari yang tua sebesar 78% dan sampai yang muda sebesar 22%

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent
Laki-Laki	29	91.0	91.0
Wanita	3	9.0	9.0
Total	32	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini terdiri wanita 3 orang (9%) dan laki-laki 29 orang (91%). Persentase perangkat desa di Desa Cengkering Pekan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan memiliki jumlah yang jauh berbeda. Hal ini berarti karakteristik berdasarkan jenis kelamin pegawai didominasi jenis kelamin laki-laki, tetapi setiap laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan berpendapat yang sama.

Tabel 4.3**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent
SMA	0	0	0
Diploma	0	0	0
S1	23	72.0	72.0
S2	9	28.0	28.0
Total	32	100.0	100.0

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebanyak 23 orang (72%) dan S2 sebanyak 9 orang (28%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai lebih banyak berpendidikan S1. Dan pegawai memiliki karakteristik pendidikan cukup tinggi. Sehingga diharapkan mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

3. Deskripsi Variabel Penelitian**a. Variabel Partisipasi Anggaran****Tabel 4.4****Tabulasi Jawaban Responden Partisipasi Anggaran**

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	10	31	19	59	2	6	1	3	0	0	32	100
2	4	13	15	47	12	38	1	3	0	0	32	100
3	4	13	13	41	8	25	5	16	2	6	32	100
4	1	3	16	50	10	31	5	16	0	0	32	100
5	5	16	12	38	13	41	2	6	0	0	32	100
6	12	38	16	50	4	13	0	0	0	0	32	100
7	10	31	19	59	2	6	1	3	0	0	32	100
8	4	13	15	47	12	38	1	3	0	0	32	100

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel partisipasi anggaran responden banyak yang menjawab setuju seperti pada pernyataan item 1 dan tujuh yang menyatakan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran sangat besar pengaruhnya terhadap partisipasi anggaran artinya setiap pegawai wajib ikut dalam menyusun anggaran di BPKD Desa Cengkering Pekan

Tabel 4.5
Tabulasi Jawaban Responden Evaluasi Anggaran

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	13	41	16	50	1	3	2	6	0	0	32	100
2	7	22	22	69	1	3	2	6	0	0	32	100
3	5	16	17	53	8	25	2	6	0	0	32	100
4	12	38	14	44	6	19	0	0	0	0	32	100
5	10	31	14	44	7	22	1	3	0	0	32	100
6	21	66	8	25	3	9	0	0	0	0	32	100
7	7	22	18	56	7	22	0	0	0	0	32	100
8	1	3	23	72	8	25	0	0	0	0	32	100
9	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
10	4	13	24	75	4	13	0	0	0	0	32	100
11	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
12	4	13	24	75	4	13	0	0	0	0	32	100

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel evaluasi anggaran responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan evaluasi anggaran yang dilakukan berjalan dengan baik sehingga responden menjawab setuju. Dari jawaban responden maka dapat dilihat item pertanyaan nomor 12 yang paling banyak responden menjawab setuju dengan pernyataan Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi artinya setiap

perangkat daerah dalam penyusunan anggaran wajib membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas agar dapat kejelasan anggaran yang akan digunakan.

Tabel 4.6
Tabulasi Jawaban Responden Akuntabilitas

No pernyataan Taan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	1	3	23	72	8	25	0	0	0	0	32	100
2	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
3	4	13	24	75	4	13	0	0	0	0	32	100
4	1	3	23	72	8	25	0	0	0	0	32	100
5	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
6	11	34	20	63	1	3	0	0	0	0	32	100
7	0	0	23	72	9	28	0	0	0	0	32	100
8	10	31	14	44	7	22	1	3	0	0	32	100
9	13	41	16	50	1	3	2	6	0	0	32	100
10	7	22	22	69	1	3	2	6	0	0	32	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah sudah baik sehingga responden menjawab setuju dengan item pernyataan nomor 3 dengan pernyataan Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi hal ini menunjukkan di kantor BPKD Desa Cengkering Pekan dalam penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran disusun sesuai dengan visi misi BPKD agar terciptanya akuntabilitas pemerintahan.

4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas

5. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

1. jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal,
2. jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Partisipasi anggaran	Evaluasi anggaran	akuntabilita s
N	32	32	32
Normal Parameters(a,b)	Mean	30,5313	48,8438
	Std. Deviation	3,61881	3,86973
Most Extreme Differences	Absolute	,085	,101
	Positive	,085	,058
	Negative	-,083	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z	,483	,572	,616
Asymp. Sig. (2-tailed)	,974	,899	,843

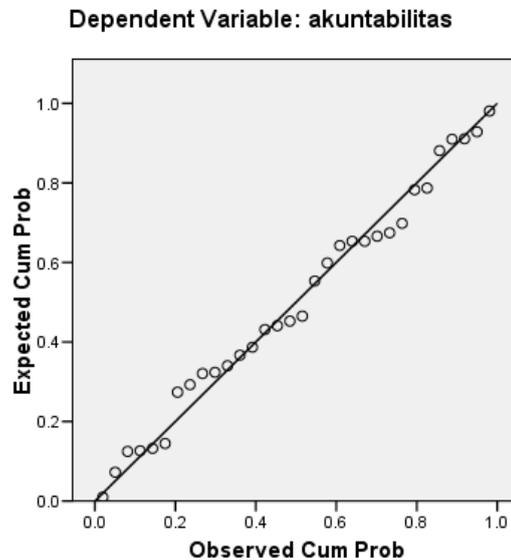
a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov- Smirnov* adalah partisipasi anggaran (X1) 0.974, evaluasi anggaran (X2) 0.899 , kejelasan sasaran anggaran (Y) 0.722 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut.

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 grafik P-Plot

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot dibawah ini. Pada grafik normal p-plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

6. Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolonearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolonearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: *Tolerance* > 0.10, dan nilai VIF < 5. Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian multikolonearitas:

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,687	3,252		2,671	,012		
	Partisipasianggaran	,216	,065	,267	4,332	,000	,903	1,107
	evaluasianggaran	,859	,092	1,136	9,322	,000	,393	2,546

a Dependent Variable: akuntabilitas

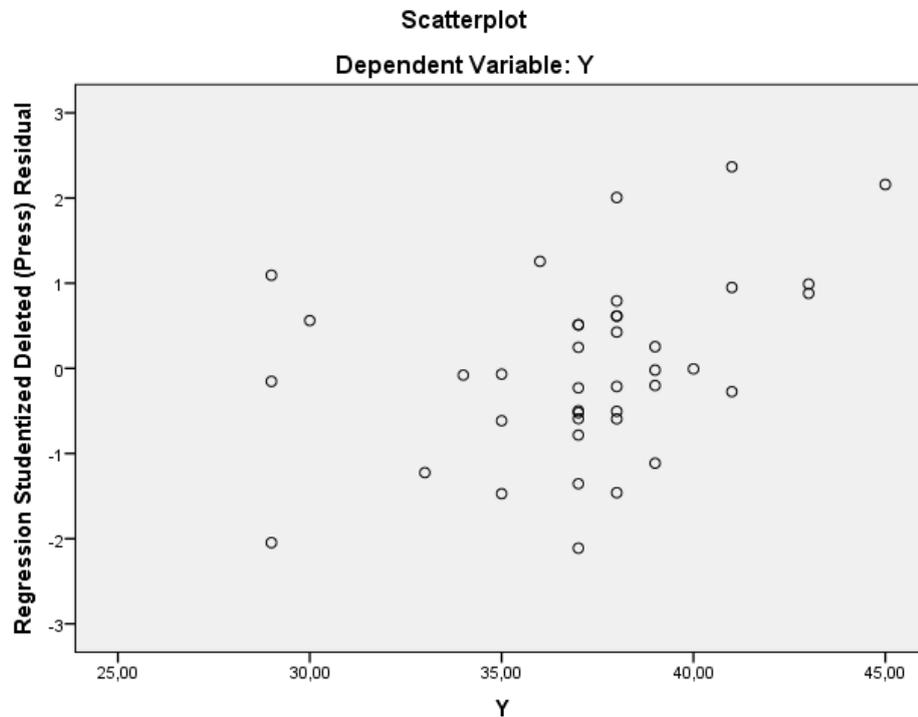
Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1.

7. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas



Gambar 4.3 Scaterplot

8. Analisis Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.0 for Windows. Untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, dilakukan memprediksi variabel *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

α	:	Konstanta
β	:	Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel
Y	:	Akuntabilitas
X1	:	Partisipasi Anggaran
X3	:	Kejelasan sasaran anggaran

Tabel 4.9
Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
	Partispasianggaran	,216	,065	,267	4,332	,000
	evaluasianggaran	,859	,092	1,136	9,322	,000

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 8,687 + 0,216X_1 + 0,859X_2 + 0,266X_3$$

Keterangan:

1. konstanta sebesar 8,687 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$) maka nilai akuntabilitas sebesar 8,687.
2. β_1 sebesar 0,216 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,216 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. β_2 sebesar 0,859 menunjukkan bahwa setiap kenaikan evaluasi anggaran sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas sebesar 0,859 dengan asumsi variabel lain tetap.

9. Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 18, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
	Partisipasi anggaran	,216	,065	,267	4,332	,000
	Evaluasi anggaran	,859	,092	1,136	9,322	,000

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel partisipasi anggaran sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,332 > 1,699$), maka partisipasi anggaran menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Evaluasi anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 9,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,332 > 1,699$), maka evaluasi anggaran secara individual mempengaruhi akuntabilitas. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Uji F

Untuk melihat pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11
Uji F
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	222,141	3	74,047	47,817	,000(a)
	Residual	43,359	28	1,549		
	Total	265,500	31			

a Predictors: (Constant), Partispasianggaran, evaluasianggaran

b Dependent Variable: akuntabilitas

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh F_{hitung} sebesar 47.817 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,99 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran, evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($47,817 > 2,99$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

10. Analisis Koefisien Regresi

Nilai koefisien korelasi (*R*) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai *R* berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R Square* semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square* maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel

dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.936 ^a	.877	.869	1.53030	1.169

Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R = 0,936$ berarti hubungan antara pengendalian internal dan pengembangan mutu pegawai terhadap pencegahan kecurangan sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat. R Square sebesar 0,877 berarti 87.7% pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh kesadaran pengendalian internal dan pengembangan mutu pegawai. Sisanya 12.3% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Adjusted R Square sebesar 0,869 berarti 86.9% pengendalian internal dan pengembangan mutu pegawai terhadap pencegahan kecurangan sementara sisanya 13.1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel partisipasi anggaran sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,332 > 1,699$), maka partisipasi anggaran

menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Peterson dan Gibson (2003), secara detail menjelaskan bahwa prosedur pengendalian intern yang jelek berhubungan pada kekurangan dalam pemisahan tugas dan ketidakhadiran rekonsiliasi bebas dari uang dan dokumentasi yang jelek dipandang sebagai faktor dimana memungkinkan kecurangan untuk terjadi. Rae dan Nava (2008), dalam penelitiannya menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa kejadian penipuan pegawai lebih tinggi terjadi di suatu perusahaan yang kualitas pengendalian internalnya buruk ataupun rendah.

Prosedur pengendalian intern yang tidak memadai, seperti kurangnya pemisahan tugas atau prosedur pengolahan transaksi yang lemah, selanjutnya akan meningkatkan risiko pegawai menjadi lebih mudah dalam melakukan perbuatan curang di perusahaan. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengendalian intern menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk lebih mengetahui sejauh mana peranan pengendalian intern pada pencegahan kecurangan pegawai di perusahaan.

2. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Evaluasi anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 9,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,332 > 1,699$), maka evaluasi anggaran secara individual mempengaruhi akuntabilitas. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

3. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh F_{hitung} sebesar 113.632 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} sebesar 3,09 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($113.632 > 3,09$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

Sifat pengembangan mutu pegawai ada tiga yaitu: pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap. Ketiga sifat ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Selain dapat meningkatkan kinerja pegawai agar lebih baik lagi dalam mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, pengembangan mutu pegawai juga sangat efektif dalam menumbuhkan kembangkan pemahaman pegawai untuk dapat mengetahui kecurangan (*fraud awareness*) dengan lebih luas dan mencegah terjadinya hal tersebut di perusahaan.

Rae dan Nava (2008), melakukan penelitian terhadap keadilan organisasi yang terjadi di lingkungan perusahaan bagi para pegawai perusahaan. Dari penelitiannya mereka menghasilkan suatu kesimpulan bahwa keadilan organisasi menjadi suatu hal yang berpengaruh dalam mencegah terjadinya penipuan pegawai di lingkungan perusahaan. Roberta (2010), melakukan penelitian terhadap denda yang diberikan terhadap pegawai yang melakukan suatu kesalahan di lingkungan perusahaan, dari penelitiannya tersebut Roberta menghasilkan suatu

kesimpulan bahwa dengan memberikan denda bagi seorang pegawai dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan di suatu perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
2. Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.
3. Partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain

1. Seharusnya perangkat desa meningkatkan partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran agar terciptanya akuntabilitas
2. Pemimpin perusahaan dapat membantu perangkat desa yang tertarik untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran pada perusahaan sehingga tercapainya tujuan perusahaan
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salim. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Latif. (2014). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Dan Karakteristik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Al-Buhuts, Volume. 10 Nomor 1.
- Abdul Wahab, Solichin. (2002). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri, 2003. *Anggaran Perusahaan*, Buku 1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Anthony, R. N. dan Govindarajan. (2003) *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Salemba Empat Edisi:1 Buku 2.
- Apandi Nasehatun. 2004. *Budget and Control*. Jakarta : Grasindo.
- Arifin. (2007). *Teori keuangan dan Pasar modal*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Atmosoeparto, Kisdarto, 2005. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ausaid (2001) *Intelektual Property Rights*. Asian Law Group
- Bastian, I. (2006). *Audit Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beny Arifin W. (2012) *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntantansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Investasi
- Dwipayana, Ari. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2005) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Falikhatun (2007) *Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan Dan Kohesivitas Kelompok*”. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Vol. 6, No.2 September 2007
- Fladimir Edwin Mbon (2014) *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Daerah Yogyakarta*
- Ghozali, Imam, (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*,

Badan Penerbit Undip.

Ginting, Ahyari. (2009). *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta. BPF. Halim, Abdul, (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen. Cetakan Kedelapan belas*.

BPFYogyakarta, Yogyakarta

Hansen & Mowen. 2004. *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat

Ida Ayu Made Dwiki Paramatiha. (2002).“ *Pengaruh Ketetapan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Akuntabilitas*”. JRAI, Vol 5 No.1, hal 85-101

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, (2000). *Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi terhadap Keefektifan Partisipasi Anggaran dalam Peningkatan Akuntabilitas Manajerial: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur*. Kelola. Yogyakarta.

Halim, A., & Syukri, A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2, 1(1).

Halim. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kennis,I (2011)” *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*”. *The Accounting Review*: 707-721

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar

Kurnia, Rahma, (2004), *Laporan Kegiatan Kursus identifikasi Dampak Lingkungan*, Jogjakarta, GEGAMA.

Locke, E.A., (2009), *Toward a Theory of Task Motivation and Incentives,*” *Organizational Behavior and Human Performance*, pp. 157-189.

Mangkuprawira, (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Mashun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Munawar, Indra. (2009). Hasil Belajar (Pengertian dan Definisi). <http://indramunawar.blogspot.com/2009/06/hasil-belajar-pengertian-dandefinisi.html?m=1>

Pamudji, S., (2006), *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.

- Rahadi, R., & Muslih, M. (2019). *Model Media Sosial di Sektor Publik: Studi Literatur*. 1–7.
- Ray, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ray, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Subroto, B. (2014). *PENGUNGKAPAN WAJIB PERUSAHAAN PUBLIK KAJIAN TEORI DAN EMPIRIS* (Pertama; U. Press, ed.). Malang: Press, UB.
- Suwanto, Priansyah, & Juni, D. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2010). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Offset YPAPI.
- Ulum, I. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.

Lampiran

Lampiran I : Kuesioner**Identitas Responden**

1. Jenis Kelamin : 1. laki-laki 2. perempuan
2. Umur : 1. thn 2. - 35 thn 3. 5 thn
3. Pendidikan : 1. SMA/SMK 2. Diploma 3.
4.

Petunjuk Pengisian

Dalam menjawab semua pertanyaan dibawah ini, Bapak/Ibu Sdr/Sdri dipersilahkan memilih salah satu jawaban yang telah tersedia dengan pendapat Bapak/Ibu Sdr/Sdri yang paling dianggap sesuai

Dengan opsi jawaban sebagai berikut:

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. TP : Tidak Pasti
4. TS : Tidak Setuju
5. STS : Sangat Tidak Setuju

AKUNTABILITAS	PENILAIAN				
1. Pimpinan Bapak/Ibu mengakui hasil pekerjaan anda	SS	S	KS	TS	STS
2. Pekerjaan Bapak/Ibu dapat memberikan contoh kepada pegawai lain	SS	S	KS	TS	STS
3. Bapak/Ibu memiliki prestasi kerja di kantor anda	SS	S	KS	TS	STS
4. Tingkat pencapaian volume pekerjaan yang saya hasilkan telah sesuai dengan harapan pimpinan	SS	S	KS	TS	STS
5. Pimpinan menetapkan target kerja dengan penuh perhitungan	SS	S	KS	TS	STS
6. Seluruh tugas yang diberikan dapat ditekuni dengan baik untuk mencapai waktu yang telah ditentukan	SS	S	KS	TS	STS
7. Pekerjaan anda telah memenuhi target yang telah ditentukan pimpinan	SS	S	KS	TS	STS
8. Bapak/ibu merasa bahwa pekerjaan yang anda kerjakan sudah sesuai dengan standar kerja perusahaan	SS	S	KS	TS	STS
9. Saya selalu dapat menjaga kestabilan	SS	S	KS	TS	STS
10. Saya mendapat kesempatan mengerjakan tugas sendiri	SS	S	KS	TS	STS

EVALUASI ANGGARAN	PENILAIAN				
1. Saya memahami persis apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya	SS	S	KS	TS	STS
2. Pimpinan saya menganggap bahwa saya sendiri yang bertanggungjawab atas penyimpangan anggaran dalam unit kerja saya	SS	S	KS	TS	STS
3. Pimpinan saya merasa puas dengan penjelasan saya atas penyimpangan anggaran dalam unit kerja saya	SS	S	KS	TS	STS
4. Pimpinan saya membicarakan kepada saya mengenai peningkatan pekerjaan untuk memenuhi tujuan RKA	SS	S	KS	TS	STS
5. Pimpinan saya akan menunjukkan ketidapuasannya mengenai anggaran unit kerja saya bila tidak tercapai	SS	S	KS	TS	STS
6. Penyimpangan anggaran yang besar dalam unit kerja saya telah mendapat komentar dari pimpinan, sehingga mengakibatkan prestasi kerja saya buruk	SS	S	KS	TS	STS
7. Saya telah menjelaskan kepada pimpinan saya mengenai item-item anggaran yang melampaui RKA karena tidak dapat saya kendalikan	SS	S	KS	TS	STS
8. Pimpinan saya akan marah atas penyimpangan yang tidak menguntungkan dari anggaran yang terjadi di unit kerja saya	SS	S	KS	TS	STS
9. Pimpinan saya menjelaskan penyimpangan anggaran pada unit kerja saya pada saat evaluasi kinerja	SS	S	KS	TS	STS
10. Untuk mencapai tujuan anggaran dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi	SS	S	KS	TS	STS
11. Saya mengerti tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didefinisikan secara jelas dan komprehensif	SS	S	KS	TS	STS
12. Saya menyadari bahwa tujuan RKA merupakan hal yang penting dan perlu diprioritaskan	SS	S	KS	TS	STS

PERNYATAAN PARTISIPASI ANGGARAN	PENILAIAN				
	SS	S	KS	TS	STS
1. Saya memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran	SS	(S)	KS	TS	STS
2. Saya secara aktif terlibat dalam proses perencanaan "bottom-up" sehingga memotivasi saya bekerja sesuai dengan tujuan	(SS)	S	KS	TS	STS
3. Pendapat saya diterima ketika menetapkan perencanaan anggaran di satuan unit kerja	SS	(S)	KS	TS	STS
4. Rencana anggaran tidak akan ditetapkan sampai saya merasa puas.	SS	S	KS	(TS)	STS
5. Saya mengadakan pertemuan dengan staf saya untuk rencana anggaran .	SS	(S)	KS	TS	STS
6. Staf saya memberikan kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran	SS	(S)	KS	TS	STS
7. Karena kendala waktu, saya sering menetapkan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran di satuan unit kerja	SS	S	KS	(TS)	STS
8. Saya bertanggung jawab atas kedudukan yang saya jalani	SS	(S)	KS	TS	STS



Bila menjawab surat ini agar di sertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 1163/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 01 April 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Netti Nababan
 N P M : 1705170202
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

Dosen Pembimbing : **Masta Sembiring, SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **28 Mei 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 16 Syawal 1442 H
 28 Mei 2021 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Perteinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1160/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Riset**

Medan, 16 Syawal 1442 H
 28 Mei 2021 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Cengkering Pekan
 Dusun Pekan 1 Desa Cengkering Pekan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Netti Nababan
 Npm : 1705170202
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan
H. Janufl., SE., MM., M.Si

Tembusan :
 1. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN MEDANG DERAS
DESA CENGKERING PEKAN

Jln. S.M. Raja No. 11 Kode Pos 21258

Hal : Balasan

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan
di-
Tempat

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Pantas Parulian Aritonang
Jabatan : Kepala Desa Cengkering Pekan

Menerangkan Dengan Sesungguhnya bahwa :

Nama : Netti Nababan
Npm : 1705170202
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Desa Cengkering Pekan Selama yang diperlukan Untuk Memperoleh Data guna Penyusunan Tugas Akhir Skripsi Dengan Judul " *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara* "

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cengkering Pekan, 04 Juli 2021
KEPALA DESA CENGKERING PEKAN
PANTAS PARULIAN ARITONANG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1811/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, 03 Muharram 1443 H
 Lamp. : - 12 Agustus 2021 M
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Cengkering Pekan
 Dusun Pekan 1 Desa Cengkering Pekan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Netti Nababan
 N P M : 1705170202
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




 Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

C.c.File



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN MEDANG DERAS
DESA CENGKERING PEKAN

Jln. S.M. Raja No. 11 Kode Pos 21258

Hal : Bulasan

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan
di-
Tempat

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :
Nama : Puntas Parulian Aritonang
Jabatan : Kepala Desa Cengkering Pekan

Menerangkan Dengan Sesungguhnya bahwa :
Nama : Netti Nubaban
Npm : 1705170202
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

Telah Selesai Melakukan Penelitian di Kantor Desa Cengkering Pekan Selama yang diperlukan Untuk Memperoleh Data guna Penyusunan Tugas Akhir Skripsi Dengan Judul " *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara* "

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cengkering Pekan, 20 Agustus 2021





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : NETTI NABABAN
NPM : 1705170202
Program Studi : AKUNTANSI PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA CENGERING PEKAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki kembali latar belakang masalah !	20/4/2021	
Bab 2			
Bab 3	Perbaiki Metode Penelitian	28/4/2021	
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkapi data-data yang dibutuhkan dan perbaiki penulisan	6/5/2021	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Seminar Proposal	24/5/2021	

Diketahui oleh
Ketua Prodi Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Mei 2021

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

(Masta Sembiring, SE, M.Ak)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : NETTI NABABAN
Tempat /Tgl Lahir : Pematang Cengkering, 09 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Pekan 1 Desa Cengkering Pekan
Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Barimun Nababan
Ibu : Lamria Sihombing
Alamat : Dusun Pekan 1 Desa Cengkering Pekan Kecamatan
Medang deras Kabupaten Batu Bara

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 010241 Pematang Cengkering
2. SMP Negeri 2 Medang Deras
3. SMA Swasta Mitra Inalum
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2021



NETTI NABABAN